

EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN

Raffa Weybi Andio

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya
raffa.22210@mhs.unesa.ac.id

Eva Hany Fanida

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya
evafanida@unesa.ac.id

Abstrak

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik merupakan suatu inovasi dan pengembangan kegiatan pengadaan kebutuhan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. fokus penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau e-procurement adalah untuk menciptakan kegiatan pengadaan yang transparan, efektif, efisien, adil dan bertanggungjawab, dan serta untuk mencegah serta meminimalisir praktik tindakan korupsi di lingkup sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan metode teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dari lima dimensi analisis antara lain *Processing, Content, Usability, Training, dan Professionalism*. dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan ditemui beberapa kendala yaitu terdapat fenomena rangkap jabatan, serta beban pekerjaan yang berlebihan yang dialami oleh pejabat yang merangkap sebagai pejabat pengadaan, dan masih adanya kendala pada pembuatan paket kecil kebutuhan dinas melalui vendor dikarenakan tidak fokus atau kurangnya ketertarikan vendor untuk mengakses sistem e-katalog sehingga terjadi *contact* diluar sistem, serta adanya ketidakpuasan pejabat pengadaan karena kurangnya apresiasi atau tunjangan khusus dalam melakukan tugas sebagai pejabat pengadaan. Peneliti memberikan saran masukan perlu adanya tunjangan sertifikasi khusus bagi pejabat pengadaan, serta perlunya *update* sistem terkait notifikasi kepada vendor jika terdapat pesanan dari pihak dinas untuk menghindari kontak diluar sistem

Kata Kunci : Efektivitas, e-procurement, e-katalog

Abstract

The electronic procurement of goods and services by the government is an innovation and development of government procurement activities utilizing information and communication technology, the focus of conducting electronic procurement of goods and services by the government to create procurement activities that are transparent, effective, efficient, fair, and accountable, as well to prevent and minimize corrupt practices within the scope of government procurement of goods and services. The purpose of this research is to describe the effectiveness of e-procurement of goods and services by the government at the Department of Environment and Food of Magetan Regency. The research method used is qualitative descriptive, with data collection employing interview and observation techniques. The research results show that the effectiveness of electronic procurement of goods and services at the Department of Environment and Food of Magetan Regency, based on five dimensions of analysis : *Proccessing, Content, Usability, Training, and Proffesionalism*. In the implementation of electronic procurement activities at the Department of Environment and Food of Magetan Regency, several problems were encountered, including the phenomenon of dual positions and excessive workload experienced by officials who also serve as procurement officers, and there are still challenges in creating small packages through vendors due to the lack of focus or interest from vendors in accessing the e-catalog system, leading to contact outside the system. Additionally, there is dissastisfaction among procurement officials due to the lack of appreciation or special allowances for their duties as procurement officers. The researcher suggests the need for special certification allowances for procurement official and the need to update the system regarding notification to vendors if there are orders from the department to avoid contact outside the system.

Keyword : Effectiveness, e-procurement, e-catalog

PENDAHULUAN

Perkembangan bentuk era digitalisasi yang kian pesat di zaman kini sudah menjadi sumber utama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas terkecil individu dan kelompok. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi turut menjadi salah satu faktor transformasi paradigma dalam segala sektor baik sektor pemerintahan maupun sektor *private* atau swasta, (Sitompul (2022) dengan penerapan sistem manajemen informasi terlahirlah bentuk bentuk pelayanan serta penyampaian informasi yang berbasis digital yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempermudah layanan informasi dengan penyampaian secara akurat, dan mudah (Prihartono, 2023). Hal ini didukung juga oleh pendapat Jusnati, dkk (2022) tentang *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan *good governance* pada tata kelola pemerintahan, dan memberikan pelayanan yang intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis dan lingkungan pemerintah dengan penggunaan aplikasi berbasis *website* dengan melalui proses perubahan internal maupun eksternal untuk mengurangi korupsi, dan peningkatan transparansi. Menurut Prayoga F & Yuhertiana (2021) *E-Government* merupakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen interaktif penyaluran informasi dan komunikasi antara instansi internal pemerintahan dan publik. Dapat disimpulkan bahwa *E-Government* merupakan suatu konsep sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses perubahan paradigma demi terciptanya pemerintahan yang baik, adil, efisien, serta transparan dihadapan publik.

Dalam pemenuhan tujuan dan pemerataan pelayanan publik, pemerintah akan selalu berusaha dalam peningkatan mutu kualitas kinerja yang kredibel serta bertanggungjawab di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mavidis & Folinas (2022) implementasi *e-procurement* merupakan suatu solusi untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Didalam setiap kegiatan itu pastinya terdapat campur tangan atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelancaran serta keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Dimana kerjasama tersebut tercipta melalui tender pemerintahan dengan menggandeng pihak *vendor* atau swasta diharapkan terciptanya jalinan kerjasama antara Pihak Pemerintah dengan swasta. Menurut Sutedi dalam (Suprianto, dkk. (2019) *Procurement* atau Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang mencakup mulai dari awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan jasa. Dalam kegiatan penawaran ini meliputi dalam hal pengajuan harga,

pengadaan barang dan jasa, serta pemborongan pekerjaan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan merupakan unit pelaksana teknis yang bergerak untuk membantu rencana kerja pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan pangan dengan optimalisasi segala sumber daya alam yang berwawasan lingkungan di seluruh tiap daerah kabupaten Magetan. Bergerak dan beroperasi dibawah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sistem *e-procurement* yang diterapkan berdasarkan sistem yang berada dibawah naungan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang tertulis bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan transaksi elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Gambar 1. Tampilan Depan E-Katalog

Sumber : e-katalog LKPP. 2024

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di pemerintahan Kabupaten Magetan di koordinasi dan diselenggarakan oleh UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mulai dari pengelolaan pengadaan, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), pembinaan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan. Kegiatan tersebut juga berlaku pada seluruh dinas di lingkup pemerintahan Kabupaten Magetan salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, proses koordinasi dan penyelenggaraan pengadaan tersebut juga meliputi beberapa metode mulai dari *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Untuk pada proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan masih menggunakan metode *e-purchasing* atau pengadaan langsung, dikarenakan kebutuhan dinas masih belum terdapat objek barang atau bentuk jasa senilai diatas dua ratus juta rupiah yang harus diperlukan tender, proses *e-purchasing* ini dilakukan melalui sistem e-katalog lokal, sebagai

bentuk dalam menanggapi proses *e-government* atau governansi digital.

Namun didalam pengembangan sistem e-katalog melalui LKPP di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan masih ditemukan berbagai kendala yang ditemukan nilai dari faktor eksternal maupun internal seperti sumber daya manusia, kesiapan penyedia, dan tanggungjawab, kemudian pada aspek kapasitas server, bagaimana server dapat membantu dalam kenyamanan *user* dalam mengakses website *e-procurement* dapat ditemukan terkadang adanya ketidakstabilan jaringan server pada saat mengakses website LKPP yang dialami oleh para *user* dan *client* selama proses pelaksanaan *e-procurement* melalui aplikasi, dan kemudian pada aspek sumber daya manusia, adanya indikasi kekecewaan di dalam pihak internal dinas yakni terdapat rasa ketidakpuasan dan menyesal telah menjadi pejabat pengadaan. Dikarenakan adanya beban pekerjaan yang lebih serta tidak adanya apresiasi atau tunjangan khusus yang mendukung pejabat melakukan tugas sebagai pejabat pengadaan.

Pada bentuk permasalahan yang terjadi yang ditemui dalam proses penyelenggaraan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan merupakan masalah internal dan eksternal, mulai dari permasalahan manajerial Sumber Daya Manusia, utilitas sistem, dan kendala dalam proses pengadaan seperti kurangnya responsibilitas penyedia untuk mengkonfirmasi pesanan sehingga pihak dinas harus menghubungi penyedia melalui luar sistem. Berdasarkan uraian permasalahan diatas mengenai Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan tersebut apakah program ini sudah sesuai dengan standar pengadaan di lingkup Pemerintahan dan akan apakah sejalan dengan penilaian efektivitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka dijadikan suatu dasar untuk mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan”

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, dengan pemodelan penjabaran metode deskriptif, penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2015) adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan teknik pendekatan deduktif-induktif. Penelitian deskriptif mencakup survei dan penyelidikan pencarian fakta dari berbagai jenis. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan keadaan permasalahan seperti yang ada saat ini. Fokus penelitian ini menggunakan teori Brandon Jones dan Kauppi (dalam Susanto,dkk. 2024) yang terdapat 6 aspek dimensi *e-*

procurement yaitu : *Processing, Content, Usability, Training, dan Professionalism*

Sumber data yang dipakai dan diperoleh meliputi sumber data primer dan sekunder, sumber data primer didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, Pejabat Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, dan Penyedia yang berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan. Dan data sekunder diperoleh melalui sumber literatur, dokumen, jurnal dan media informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data menggunakan proses wawancara dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan pemahaman mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik, serta observasi dilakukan secara langsung dengan melihat kondisi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pengadaan, dan kemudian dokumentasi berupa berkas atau dokumen tentang proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan. Teknik Analisis Data menggunakan metode dari Miles and Huberman (dalam Hardani,dkk. (2020)) yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik melalui e-Katalog merupakan suatu bentuk realisasi dari peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menciptakan terselenggaranya kegiatan pengadaan yang Transparan, Efektif, Efisien, Adil, Jujur, dan Bertanggungjawab. (Sholeh et al. (2024) hal ini berlaku diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintahan Daerah, salah satunya Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, yang mengajak seluruh lembaga, dan dinas pemerintahan Kabupaten Magetan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-katalog, salah satunya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.

Pada proses kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa memiliki empat opsi mulai dari tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan Purchasing, kegiatan Purchasing pada e-Katalog menawarkan potensi proses pemilihan yang ringkas dan tercatat secara otomatis, dengan demikian bisa dikatakan proses transparansi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa mampu mencapai pada aspek tingkat detail dan real time, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan manajemen aset. Pada hal ini merupakan suatu keuntungan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik karena terintegrasi nya sistem karena adanya koneksi internet dan

teknologi informasi dan komunikasi (Sa'adah (2020).



Gambar 2. Tampilan menu depan e-Katalog
Sumber : e-Katalog LKPP. 2024

Gambar diatas merupakan tampilan menu etalase lokal dari website platform e-katalog versi 5.0, pada tampilan ini tertera menu menu katalog mulai dari katalog nasional, lokal, sektoral, UMKK, Inovasi, TKDN, BUMDes, SNI, dan Kategori sektor Hemat Energi. Model dari e-katalog ini mirip seperti e-commerce bagi keperluan instansi pemerintah, namun mampu menyediakan fasilitas negosiasi dan kompetisi bagi para vendor untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah dan pada opsi negosiasi ini atau mini kompetisi, dapat dilakukan koreksi terhadap spesifikasi dan harga dilakukan melalui beberapa langkah tidak terbatas pada klarifikasi, konfirmasi, cek dan ricek oleh kedua pihak, dengan melalui proses komunikasi antar kedua belah pihak hingga terjadi kesepakatan atas spesifikasi dan harga yang adil dan menjawab prinsip efektif-efisiensi penggunaan keuangan negara proses komunikasi ini telah disediakan melalui fitur chat dalam aplikasi. Dan pada opsi mini kompetisi, koreksi atas harga dilakukan melalui mekanisme persaingan dimana pelaku usaha secara otomatis akan terundang pada forum kompetisi. Sehingga semua aktivitas kegiatan pengadaan dalam sistem e-katalog semua tercatat dan sesuai dengan yang ada di sistem.

Terdapat 5 aspek dimensi dalam mengukur efektivitas e-procurement menurut Brandon Jones dan Kauppi (dalam Susanto, dkk. (2024)) yaitu :

a) *Processing*

Pada indikator processing pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan melalui aplikasi e-katalog, yang telah diatur pada Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Magetan yang berdasarkan pada peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Didalam pedoman tersebut Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :

- Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa
- Penetapan Jenis Barang/Jasa
- Cara Pengadaan
- Pemaketan dan Konsolidasi

- Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa, dan
- Anggaran Pengadaan

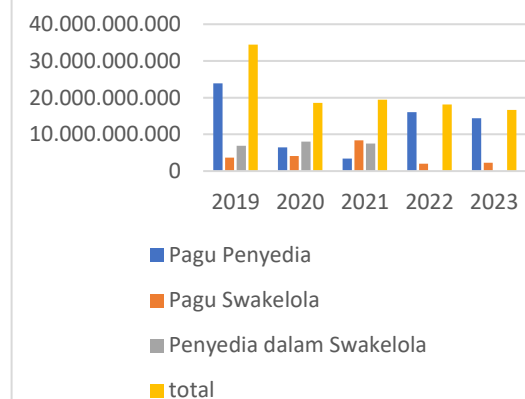
Pada aspek *Processing* pada kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan melalui beberapa tahap yakni :

1. *Perencanaan Pengadaan*

Pada proses perencanaan pengadaan terdiri atas

- Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- Perencanaan Pengadaan melalui penyedia.

Dan semua hasil perencanaan tersebut dimuat didalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) didalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)



Gambar 3. Grafik RUP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 5 Tahun Terakhir

Sumber : Data Sekunder. (SIRUP). 2024

Penyelenggaraan RUP (Rancangan Umum Pengadaan) dimulai setiap awal tahun, karena rancangan inilah yang akan digunakan untuk sebagai syarat pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog, dan juga integrasi data anggaran yang akan dipakai untuk melakukan pengadaan.

Dan hal tersebut disampaikan oleh Bapak Saif Muchlissun, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, yakni :

“Iya Mas RUP ini dilaksanakan di setiap tahun /per tahun atau tutup buku untuk tahun sebelum nya dan direncanakan untuk tahun berikutnya dan itu kita rapatkan terlebih dahulu untuk perencanaannya dari tiap bidang yang ada di dinas ini kita rapatkan untuk membahas rencana anggaran pengadaan di tahun depan, dan dari data RUP itu semua rekaman data tentang pengadaan untuk di e-katalog semua otomatis tercatat sesuai

dengan RUP” (Wawancara tanggal 13 Agustus 2024).

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua pengerjaan dari awal pengadaan semua dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan pengadaan, seperti pada perencanaan Rancangan Umum Pengadaan yang akan diadakan rapat sebelum akhir tahun untuk merancang *budget* anggaran dinas di tahun selanjutnya.

Pada hasil observasi yang dilakukan dalam proses perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. PA (Pengguna Anggaran) berperan sebagai penanggungjawab kegiatan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang akan memproses perencanaan kebutuhan kegiatan dinas dengan mempertimbangkan mulai dari Identifikasi rencana kerja, Penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), ketersediaan barang/jasa atau penyedia yang tersedia, ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri dan penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) sesuai spesifikasi teknis/KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pengusulan anggaran. Kemudian selanjutnya dalam perencanaan pengadaan juga terdapat pertimbangan untuk melibatkan para pihak yang berwenang dalam ekosistem kegiatan pengadaan seperti pihak UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, kemudian pertimbangan ketiga melalui hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya, analisis pasar atau rekomendasi strategi pengadaan yang didapatkan dari sumber laporan pengadaan yang dilakukan oleh UKPBJ.

2. Penayangan Spesifikasi

Pada proses selanjutnya penayangan spesifikasi, pada tahap ini mengacu pada rancangan dan pertimbangan rencana pengadaan yang telah dibuat sebelumnya, menurut pernyataan dari Ibu Ita Zuhniusmah selaku Perencana Ahli Muda dan Pejabat Pengadaan menyatakan bahwa :

“Proses pemilihan dan penayangan spesifikasi pengadaan ini, lumayan sulit ya, karena kita mencantumkan spesifikasi kebutuhan barang/jasa harus netral sekali, untuk pada barang misalnya seperti contoh kebutuhan laptop atau elektronik,

disitu kita tidak boleh menyebutkan salah satu merk, kemudian spesifikasi sistem juga harus netral juga tidak boleh ada spek dari merk ini, jadi harus benar benar netral.” (Wawancara tanggal 13 Agustus 2024)

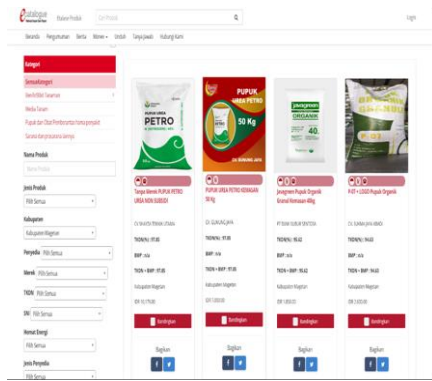
Berdasarkan hasil wawancara diatas, bentuk penayangan spesifikasi barang/jasa dibutuhkan oleh dinas tidak boleh sama sekali mencantumkan suatu item atau jasa yang menitikberatkan pada suatu merk produk atau spesifikasi unggul yang dimiliki oleh suatu pabrian, sehingga pada penayangan tersebut harus netral dan para penyedia berhak untuk mengikuti serta menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dilampirkan oleh dinas, namun untuk metode *e-purchasing* dinas boleh memilih secara langsung melalui sistem e-katalog namun tetap sesuai dengan *budget* dan anggaran yang telah ditetapkan

3. Pemilihan Vendor

Pada pemilihan vendor atau penyedia di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan untuk pemilihan vendor menurut pernyataan Ibu Ita Zuhniusmah selaku Perencana Ahli Muda dan Pejabat Pengadaan menyatakan bahwa :

“Ada beberapa metode ya, tergantung dengan value atau nilai barang/jasa yang dibutuhkan, jika nilai barang atau jasa dibawah harga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka bisa dilakukan penunjukan langsung, tapi jika melebihi itu ya bisa dilakukan tender, namun ada juga bisa tender, tapi untuk ini kita tidak pernah melakukan tender karena tidak pernah ada pengadaan yang lebih dari angka dua ratus juta” (Wawancara tanggal 13 Agustus 2024)

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan untuk sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan masih melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan melakukan metode *e-purchasing* melalui e-katalog dengan melakukan penunjukan langsung atau mencari barang/jasa yang dibutuhkan melalui etalase katalog lokal Kabupaten Magetan.



Gambar 4. Pilihan Item etalase lokal ketahanan pangan Kabupaten Magetan
Sumber : e-Katalog. 2024

Pada gambar tampilan tersebut merupakan menu dari salah satu etalase yang tersedia dalam e-Katalog, dalam metode *e-purchasing* dinas melalui Pejabat Pengadaan dapat dengan mudah mencari dan memilih barang/jasa yang dibutuhkan, setelah proses pencarian ini Pejabat Pengadaan memilih dan memasukkan item dalam keranjang untuk diproses ke tahap selanjutnya yakni pembuatan paket serta jika harga yang tertera setelah pertimbangan dari setiap aspek dirasa masih terlalu tinggi, pejabat pengadaan dapat mengajukan negosiasi kepada penyedia, dan setelah proses tersebut akan di serahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk di review.

4. Proses Persetujuan dan Pemilihan Final

Pada proses selanjutnya yakni setelah proses pencarian dan pembuatan paket, dan persetujuan dari penyedia, maka Pejabat Pengadaan akan menyerahkan dokumen paket pengadaan tersebut kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pengadaan langsung atau *e-purchasing* di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan,

Peran pejabat pengadaan sangat diperlukan untuk proses awal mulai dari pencarian barang hingga persetujuan paket hingga akhirnya diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), hal tersebut dijabarkan oleh Ibu Ita Zuhniusmah selaku Perencana Ahli Muda dan Pejabat Pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yang menjabarkan bahwa :

“Untuk alur proses nya dikatakan panjang juga tidak, pendek pun juga tidak, cuma perbedaan dengan konvensional dan elektronik cuma ada beberapa

kegiatan yang diringkas dan semua itu kan serba dilakukan melalui sistem, untuk awalnya pejabat pengadaan mencari barang yang dibutuhkan, setelah itu kita pilih dan masukkan di keranjang, setelah itu proses pembuatan paket dan negosiasi kepada penyedia, setelah negosiasi selesai pejabat pengadaan dan penyedia menyetujui paket, setelah itu dikirim ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yakni kepala Dinas” (Wawancara tanggal 13 Agustus 2024).

Dari hasil pernyataan diatas pada proses persetujuan, Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan melakukan review dan pertimbangan sebelum melakukan finalisasi pemilihan kepada vendor. Setelah melalui hasil review dan pertimbangan maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berhak untuk memutuskan untuk pembelian atau pengadaan barang/jasa tersebut dengan membuat surat pesanan atau kontrak terkait pembelian/pengadaan barang atau jasa kepada penyedia melalui sistem.

Berdasarkan pada hasil observasi untuk dokumen mengenai surat pesanan atau kontrak kepada penyedia berisi tentang detail pesanan *item*/barang yang akan dipesan atau dibeli. Didalam dokumen tercantum kuantitas barang yang dipesan, harga satuan, tanggal pengiriman produk dan total harga dari semua item yang dipesan di penyedia tersebut, kemudian terdapat isi syarat dan ketentuan kontrak, dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5. Pembelian dan Pengiriman

Di proses pembelian, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan memberikan surat kepada Pejabat Pengadaan yang dimana didalam surat tersebut terlampir keputusan pembelian barang/item yang dikehendaki, dan terlampir juga dokumen persiapan *e-purchasing*, kemudian penyedia akan memproses pembelian dan mengeluarkan bukti pengiriman dan nota pembelian yang akan diupload didalam sistem.

Pada hasil wawancara, vendor turut berpartisipasi dan melakukan sistem *double checking* yakni mengirim dan mengupload dokumen penting tentang pengadaan

barang dengan cara melakukan kegiatan *archive* atau pengarsipan dokumen melalui aplikasi ketiga untukantisipasi adanya kekeliruan yang dilakukan oleh sistem. setelah itu barang akan diproses kirim ke alamat kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.

Gambar 5. Dokumen Berita Acara Penerimaan Barang

Sumber : Data Sekunder. 2024

Pada hasil dokumentasi dan observasi diatas pada lembar berita acara tertera agenda pekerjaan pengadaan, dan tertera nominal nilai dari barang yang telah dibeli.

6. Proses Pembayaran

Berlanjut pada proses pembayaran merupakan proses tahap akhir dari pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, proses pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran dinas, seperti yang dinyatakan oleh bapak Saif Muchlissun. S.Sos., MM selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yang menyatakan bahwa :

“Proses pembayaran ya harus tersistem juga, dan ada dokumentasi nya semua, karena itu nanti yang akan kita laporkan di LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keluarnya anggaran nya berapa itu harus sama dan sesuai dengan nota dan kwitansi, dan pengeluaran anggaran nya itu juga sudah tercantum di kode RUP (Rencana Umum Pengadaan)” (Wawancara tanggal 13 Agustus 2024)

Pada pernyataan diatas disimpulkan bahwa proses pembayaran kepada vendor pada kegiatan pengadaan barang/jasa

secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan telah dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, dengan menerapkan proses dokumentasi atau pemberkasan dari kegiatan pengadaan dengan tujuan untuk proses pelaporan dalam dokumen laporan pertanggungjawaban.

Alur proses pada pengadaan barang jasa/pemerintah secara langsung melalui e-katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan berjalan melalui beberapa proses, namun tetap dikemas ringkas dan cepat dan tersistem, proses koordinasi tetap diperlukan meskipun semua melalui sistem, agar semua berjalan secara terstruktur dan rapi. Menurut Zahran, dkk. (2022) pelaksanaan Standar Operasional Prosedur jika dilaksanakan dengan baik maka semua proses akan berjalan secara efektif, dan mencegah adanya kontak langsung kepada penyedia, dan semua proses akan tercatat dengan baik.

Dalam proses ini sumber daya manusia merupakan operator atau pelaksana dalam kegiatan tersebut, namun setiap kegiatan selalu terdapat permasalahan yang dimana sumber masalah tersebut berasal dari sumber daya manusia ataupun sistem yang terkadang mengalami gangguan, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ita Zuhniusmah selaku Perencana Ahli Muda dan Pejabat Pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yang menyampaikan bahwa :

“Kadang ini Mas ya, kita kesulitan itu untuk membuat paket paket kecil seperti makan-minum untuk kebutuhan rapat, kan itu kadang dadakan ya. biasanya dari penyedia atau vendornya ini tidak selalu melihat notifikasi sistem e-katalog, jadi ya akhirnya kita sering backup atau mengabari dengan cara mengirim melalui Whatsaap” (Wawancara tanggal 13 Agustus 2024).

Kendala dan hambatan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog adalah sering miss nya vendor untuk menanggapi pesanan melalui e-katalog sehingga pihak dinas dalam hal ini pejabat pengadaan sering menghubungi kembali dengan melalui telepon atau *whatsapp* kepada penjual untuk menyetujui pesanan yang telah dibuat di sistem *e-katalog*, karena jika transaksi dilakukan di luar *e-katalog* dikhawatirkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terkadang terdapat gangguan atau pemeliharaan sistem secara mendadak yang terkadang turut menjadi rintangan dalam mengakses sistem *e-katalog*, proses penerapan sistem akan memiliki banyak

kesulitan awalnya, namun seiring waktu akan semakin memudahkan dalam proses pengadaan (Jusniati,dkk. (2022)

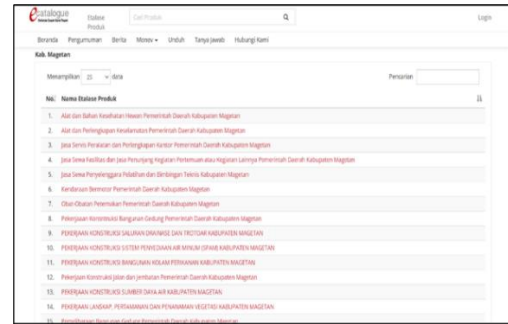
Namun berdasarkan bukti wawancara dan observasi di lapangan pejabat pengadaan masih terbuka dan cukup memberikan nilai positif pada peralihan yang sebelumnya konvensional menjadi elektronik, namun hanya terkendala masih kurang efektifnya untuk pembuatan paket paket kecil pada e-katalog karena masih kurangnya fokus penyedia atau penjual terhadap sistem e-katalog dan ketiadaan notifikasi pada sistem *e-katalog* pada penyedia.

b) *Content*

Suatu program atau sistem yang dibuat atau dirancang oleh pemerintah akan efektif dan langsung terasa manfaatnya apabila, sistem dapat menyajikan dan membantu para penggunanya untuk menemukan apa yang dibutuhkan atau diinginkan, hal tersebut dapat dinilai dari bagaimana sistem menyajikan isi tampilan yang dapat membantu operator atau user menemukan apa yang diinginkan serta ketersediaan banyaknya opsi pilihan untuk menjadi pertimbangan user.

Untuk aspek *content* pada e-katalog pada proses pengadaan barang/jasa pemerintahan secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, untuk pemilihannya selalu dilakukan pada menu etalase lokal, yakni untuk katalog di regional Kabupaten Magetan, hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Ita Zuhniusmah selaku Pejabat Pengadaan dan Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yang menyatakan bahwa :

“untuk pengadaannya sering lokal ya Mas, jika lokal ada ya mending lokal saja, kecuali kalau produk yang dicari di lokal tidak ada baru kita mencari di katalog Nasional, tapi untuk sejauh ini kita belum pernah mencari diluar katalog lokal dan untungya di Kabupaten Magetan semua sudah tersedia dan untuk prosesnya kan mudah dan bisa langsung sampai”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2024).



Gambar 6. Tampilan Etalase Lokal Kabupaten Magetan

Sumber : e-Katalog. 2024

Dan pada aspek *Content* e-Katalog mampu menampilkan data secara rinci dan detail sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan bagi user untuk memilih barang/jasa

c) *Usability*

Merupakan suatu aspek yang menitikberatkan pengalaman interaksi pengguna pada saat menggunakan sistem, mulai dari aksesibilitas, kemudahan yang didapat saat mengakses sistem, ketersediaan sistem, dan kemudahan akses navigasi layar pada sistem. Proses pengenalan program atau sistem, atau bentuk transformasi perpindahan dari sebelum konvensional menjadi digitalisasi atau elektronik, Menurut Narasmita dan Fanida (2019) *Accesibility*, *Flexibility*, dan *Simplicity* merupakan aspek penting dalam penerapan sistem, bagaimana suatu sistem dapat dengan mudah diakses serta memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memperoleh apa yang diinginkan atau membantu pekerjaannya. Bagaimana pejabat pengadaan mampu memproses tugas pengadaan barang/jasa secara cepat dan tepat melalui sistem e-katalog, mulai dari pencarian penyedia hingga proses deal kepada penyedia

Aksesibilitas sistem, Ketersediaan sistem, pemahaman dan kelancaran navigasi sistem sangat berpengaruh dalam proses berlangsungnya program, Dalam hal ini aspek *Usability* sistem e-katalog dalam membantu tugas pekerjaan pejabat pengadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara langsung.

Pada aspek *usability* pada indikator ketersediaan sistem juga turut menambah hasil positif pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, sistem e-katalog juga mampu dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Proses orientasi pada perubahan dan pengenalan sistem ini juga turut mendukung dalam aspek pemahaman sistem bagi para pengguna dikarenakan untuk

transformasi ini pastinya telah melalui *trial and error* dan koordinasi langsung dengan pihak pihak yang akan mengalami dampak dan merasakan efek dari perubahan ini, pada hasil observasi dan wawancara seluruh pejabat pengadaan sangat mudah memahami sistem dan tidak ada kendala besar dalam sistem.

Namun terdapat satu kendala kecil dimana tidak terintegrasinya data antara menu etalase lokal dengan isi etalase, yang dimana pengguna harus mencari kembali domisili untuk menampilkan item yang ditawarkan ditawarkan di domisili tersebut.

d) *Training*

Pelatihan atau *training* merupakan suatu aspek terpenting dalam penerapan awal atau pengenalan suatu program atau sistem kepada para pengguna, karena dari pelatihan inilah sumber daya manusia yang mengoperasikan atau menggunakan sistem tersebut mampu memahami secara detail tentang sistem yang akan digunakan, menurut (Utomo dan Meirinawati. (2020)) Pemahaman Program atau sistem merupakan faktor penting dalam realisasi program, agar program atau sistem dapat berjalan efektif. jika tidak ada pelatihan maka proses pengenalan dan penggunaan secara massal sistem tersebut akan gagal dan berujung pada ketidakefektifan suatu sistem, maka dari itu pelatihan sangatlah penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten serta *capable* dalam mengoperasikan sistem tersebut. hal tersebut juga didukung oleh pendapat Jain dalam (Maepa et al. (2023) faktor kritikal yang mendukung kesuksesan e-procurement adalah salah satunya pelatihan terhadap pegawai, jika hal tersebut tidak dilakukan maka pelaksanaan tidak akan berhasil dengan baik, kemudian dukungan atasan atau *Top Management* juga turut menambah kontribusi keberhasilan pelaksanaan *e-procurement* (Masudin et al. (2021)

Dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan proses pelatihan menjadi pejabat pengadaan dilakukan terstruktur, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, menjadi Pejabat Pengadaan dilakukan melalui proses sertifikasi yang diadakan oleh UKPBJ (Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Magetan, yang diadakan selama rentang waktu satu minggu, dari proses tersebut Aparatur Negeri Sipil akan diberikan materi dan pengenalan serta ujian akhir, yang dimana akan menentukan lulus atau tidaknya Aparatur Sipil Negara memiliki sertifikasi ahli pengadaan tingkat dasar. (Nainggolan, dkk. (2022)

Kemudian untuk para penyedia juga diadakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang bekerjasama juga dengan UKPBJ Kabupaten Magetan. sehingga dapat disimpulkan aspek *Training* pada kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan telah terpenuhi dikarenakan Sumber Daya Manusia, yakni Pejabat Pengadaan telah memperoleh sertifikasi dan pemahaman untuk mengatur dan mengelola sistem e-Katalog.

e) *Professionalism*

Professionalism atau profesionalisme mengacu pada siapapun yang bekerja atau melakukan tugas yang membutuhkan ketrampilan atau pelatihan tertentu, dan bagaimana seseorang tersebut menyikapi pekerjaan nya dan kemampuan nya dalam meng-handle tugas nya. Seperti halnya kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dibutuhkan kemampuan yang kompeten dan serius pada bidang pengadaan dan perlu adanya sertifikasi kompetensi khusus yang dimiliki oleh orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, secara langsung melalui e-katalog, Ariesta (2021) akuntabilitas pegawai yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga hal tersebut sangat dituntut dari para pegawai untuk menciptakan tata kelola dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara menyeluruh maka disimpulkan bahwa Pejabat Pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan selalu bekerja penuh dengan koordinasi dengan sesama pejabat pengadaan, dan dalam menanggapi hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka pejabat pengadaan akan melakukan koordinasi didalam internal di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, jika masalah tersebut tidak ditemukan solusi atau pemecahan masalahnya maka akan segera diteruskan dan dilaporkan kepada Pihak UKPBJ.

Kemudian untuk aspek *Profesionalism* juga terdapat indikator bagaimana fleksibilitas atau respon yang diberikan Pejabat Pengadaan dalam menangani kegiatan pengadaan, Pejabat Pengadaan menganggap ini merupakan tugas penting dan utama karena merupakan perintah langsung dari Kepala Dinas yang pasti merupakan suatu kepentingan bagi berlangsungnya tugas dinas. Kemudian pada indikator kepuasan, terdapat ketidakpuasan

dalam aspek manajerial kepegawaian yang dimana adanya beban pekerjaan yang berlebih serta tidak adanya apresiasi atau tunjangan khusus bagi pejabat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pengadaan.

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat pada 5 dimensi yang telah terpenuhi sesuai dengan model teori dari Brandon Jones dan Kauppi yakni :

a) *Processing*

Proses dan alur kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-katalog ini telah berjalan dengan sesuai peraturan yang berlaku dimulai dari awal pembentukan Rencana Umum Pengadaan, pencarian barang hingga proses kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyelesaian paket telah diterapkan sesuai aturan, namun masih terdapat kendala kecil antara penyelenggara dan penyedia namun hal tersebut dapat segera teratasi langsung oleh pejabat pengadaan, setelah melakukan penunjukan atau pembelian dalam sistem untuk diproses oleh penyedia, serta terdapat bukti surat pertanggungjawaban yang diterbitkan oleh dinas serta nota pembelian yang diterbitkan oleh penyedia.

b) *Content*

Pada penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa pemerintahan secara elektronik melalui e-katalog, sistem dapat menampilkan isi secara rinci dan valid mulai dari menu dan etalase kepada para pengelola atau dalam hal ini pejabat pengadaan, untuk mencari barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dinas, pada tampilan produk dibuat sedetail mungkin mulai dari foto produk, nama penyedia, dan lokasi serta harga dan bahan baku. Kemudian sistem e-katalog mampu menyajikan data secara komprehensif sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi penyelenggara pengadaan, serta memberikan aspek kompetisi bagi para penyedia dan penyelenggara dengan menyediakan metode negosiasi, mini kompetisi, dan *competitive catalogue*

c) *Usability*

Ketergunaan, bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Dalam hal ini sistem e-katalog memiliki nilai positif dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, sistem e-katalog mampu menyediakan aksesibilitas yang baik, mulai dari kemudahan dalam pengoperasian sistem, ketersediaan sistem,

hingga kelancaran navigasi. Namun masih adanya hambatan kecil pada indikator kelancaran navigasi dikarenakan adanya tidak terintegrasi nya data pada menu etalase katalog lokal

d) *Training*

Aspek dimensi ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan memilih Pejabat Pengadaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dengan pemilihan pejabat pengadaan yang telah melalui proses ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar untuk menangani dan mengelola segala kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan untuk penyedia diberikan pelatihan dan training mengenai sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-katalog serta pembimbingan pendaftaran untuk ikut serta sebagai penyedia yang terdaftar di e-katalog

e) *Professionalism*

Dalam aspek ini sangat berpengaruh pada efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik, karena mengacu pada perilaku pegawai dalam menerima tugas sebagai pengelola atau pejabat pengadaan, serta sikap integritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan pejabat pengadaan telah melaksanakan tugas dengan penuh koordinasi dengan sesama pejabat dan memastikan proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur, namun terdapat permasalahan pada manajerial kepegawaian, namun hal tersebut tidak menjadi masalah dalam proses terselenggaranya pengadaan barang/jasa di dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan

SARAN

Dari permasalahan diatas Peneliti ingin memberikan saran dan masukan yang dapat disampaikan yakni :

1. Melakukan update pada sistem dan pembaharuan sistem menuju kepada aplikasi yang terintegrasi dengan server pemerintah, untuk memberikan aspek *focus of interest* kepada para penyedia. Dikarenakan kurangnya ketertarikan penyedia terhadap sistem e-Katalog dan meminimalisir adanya kontak diluar sistem
2. Adanya pemberitahuan lebih lanjut tentang *maintenance* sistem, saran untuk menjadwalkan pemeliharaan sistem setiap seminggu sekali secara rutin.
3. Penyesuaian atau pengadaan tunjangan bagi para pejabat pengadaan agar mendapat rasa kepuasan serta bentuk apresiasi kepada pejabat pengadaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26>
- Dhea Narasmita, N., & Fanida, E. H. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar (Siladamas). *Publika*. <http://36.81.200.96/siladamas/>.
- Hardani MSi, A., Ustiaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Jusniati, Parawangi, A., & Wahid, N. (2022). *Efektivitas E-Procurement (Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik) Di Kabupaten Bone*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kima/p/index>
- Maepa, D. N., Mpwanya, M. F., & Phume, T. B. (2023). Readiness factors affecting e-procurement in South African government departments _ Maepa _ Journal of Transport and Supply Chain Management. *Journal of Transport and Supply Chain Management*, 17.
- Masudin, I., Aprilia, G. D., Nugraha, A., & Restuputri, D. P. (2021). Impact of E-Procurement Adoption on Company Performance: Evidence from Indonesian Manufacturing Industry. *Logistics*, 5(1). <https://doi.org/10.3390/logistics5010016>
- Mavidis, A., & Folinas, D. (2022). From Public E-Procurement 3.0 to E-Procurement 4.0; A Critical Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(18). <https://doi.org/10.3390/su141811252>
- Nainggolan, B. R., Tiurma, T., & Sipahutar, U. (2022). PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 GOVERNMENT GOODS AND SERVICES PROCUREMENT TRAINING BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 12 OF 2021. *ABDIMAS GALUH*, 4(1), 293–301.
- Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79>
- Prihartono, D. (2023). Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2).
- Sa'adah, N. (2020). The Implementation of E-Procurement in Indonesia: Benefits, Risks, and Problems. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(2), 283–304. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.283-304>
- Septa Zahran, W., irwansyah, I., & Lase, R. (2022). MANABIS (Jurnal Manajemen dan Bisnis) EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KELURAHAN CAKUNG BARAT. *Media Eletronik*, 1(3), 250–258. <https://doi.org/10.54259/manabis>
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sitompul, A. (2022). View of E-Procurement System In The Mechanism Of Procurement Of Goods And Services Electronically. *Internal Asia Of Law and Money Laundering*.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Santoso Haryono, B. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *JIAP*, 5(2), 251–259.
- Susanto, H., Martono, T., Wardani, D. K., Sangka, K. B., & Wahyono, B. (2024). The quality dimensions and acceptance of the newly launched e-procurement system (SIPLah) in Indonesian schools: Insights from a comprehensive dataset. *Data in Brief*, 55. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110613>
- Utomo, N. S., & Meirinawati. (2020). Efektivitas Program Rumah Bahasa Di Balai Pemuda Kota Surabaya. *Publika*. <http://jipp.jatimprov.go.id>

